

Judul : Kasus Umrah, Kemenag Jangan Cuci Tangan
Tanggal : Sabtu, 31 Maret 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Kasus Umrah, Kemenag Jangan Cuci Tangan

Untuk melindungi jemaah umrah, dipandang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pelayanan Ibadah Haji yang mencakup masalah pelayanan umrah.

SYARIEF OEBADILLAH
oebay@mediaindonesia.com

MELEDAKNYA kasus penelantaran dan penipuan terhadap puluhan ribu jemaah umrah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau biro umrah nakal membuat semua kalangan prihatin dan mendesak Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat pengawasan.

Di sisi lain, Kemenag merespons hal itu dengan menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, juga mencabut izin empat biro umrah nakal.

Respons Kemenag itu mendapat apresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperbaiki tata kelola umrah yang lebih baik. Meski begitu, Kemenag diminta tidak cuci tangan pada kasus terbesar penipuan dalam sejarah umrah di Indonesia ini.

"Kemenag tidak boleh cuci tangan

Kasus Biro Perjalanan Umrah Bermasalah

1 PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)

- Jumlah korban : 63.310 calon jemaah
- Kerugian : Rp905,3 miliar

2 PT Amanah Bersama Ummat (ABU Tours)

- Jumlah korban : 86.720 calon jemaah
- Kerugian : Rp1,4 triliun

3 PT Solusi Balad Lumampah (SBL)

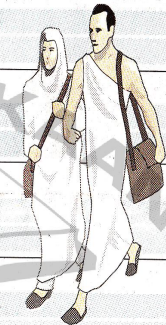
- Jumlah korban : 12.845 calon jemaah
- Kerugian : Rp300 miliar

4 PT Ustmaniyah Hannien Tour

- Jumlah korban : 1.800 calon jemaah
- Kerugian : Rp37,8 miliar

5 PT Assyifa Wisata Mandiri (biro perjalanan Kafilah Rindu Kabah/KRK)

- Jumlah korban : 3.065 calon jemaah
- Kerugian : Rp50 miliar



Sumber: YLKI/Tim MI

terhadap berbagai penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah. Masih terulangnya kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak regulator," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Zainut mengusulkan, jika mendesak untuk mengetahui kondisi 900 lebih PPIU yang ada, perlu dilakukan audit keuangan terhadap mereka.

Guna melakukan langkah serius dalam melindungi jemaah umrah, ia mengimbau perlu dilakukan pengawasan ketat.

Ia mencontohkan, untuk ibadah haji

ada Komisi-Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan haji, sedangkan untuk umrah tidak ada. Padahal, peminat ibadah umrah tidak kalah banyak daripada ibadah haji.

"Jadi, perlu dipikirkan secara serius perlindungan terhadap mereka. Menurut saya, harus dimasukkan regulasi agar ada jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atau revisi Undang-Undang Pelayanan Ibadah Haji yang mencakup masalah pelayanan umrah ini," tukas Zainut yang juga anggota Fraksi PPP DPR.

Di Bangka Belitung, Gubernur Erzaldi Rosman Djohan mengetahui ada 52 korban jemaah umrah ABU Tours di wilayahnya yang gagal berangkat. Ia mengaku prihatin atas musibah yang dialami para jemaah umrah tersebut.

Karena itu, Erzaldi meminta seluruh jemaah umrah yang sudah dirugikan tak usah ragu untuk melapor ke pihak kepolisian.

Kasar

Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sumi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya menunggu apabila ada kelompok masyarakat atau perseorangan yang ingin melaporkan anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan.

Ia pun tidak ingin menilai apakah umpatan Arteria Dahlan itu melanggar etika atau tidak. Namun, secara pribadi, Dasco mengaku dapat memaklumi kekusaran Arteria Dahlan terhadap kasus penipuan ibadah umrah.

Sebelumnya, Arteria Dahlan memperlakukan biro umrah bodong saat rapat Komisi III bersama Jaksa Agung M Prasetyo. Dalam kesempatan itu Arteria sempat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Kementerian Agama.

"Masalah *travel* yang bodong tadi, saya satu komisi, satu bulan sama ini Pak, ini masalah dapil. Yang dicari jangan kayak tadi Bapak lakukan inventarisasi. Pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bangsat semuanya, Pak," kata Arteria di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3).

Di lain sisi, Dasco mengaku kasihan dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait dengan kasus penipuan ibadah umrah itu.

"Karena mungkin laporan-laporan yang disampaikan juga tidak benar. Bagaimana kemudian kejadian seperti ini kerap berulang, yang harusnya ada bagian-bagian di situ yang memonitor. Kan kasihan rakyat ini," kata Dasco. (Nov/RF/X-6)